

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensional, yang terus menjadi tantangan besar bagi banyak wilayah di Indonesia. Tidak terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kemiskinan, analisis masalah kemiskinan ini sangat kompleks dan memiliki banyak dimensi. Hal ini dikarenakan banyaknya definisi mengenai kemiskinan. Dimana kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga memiliki banyak aspek, seperti sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik (Asrol & Ahmad, 2018). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih berada pada kisaran 9,36% dari total populasi. Penyebab utama kondisi ini meliputi tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya kualitas pendidikan, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Meskipun berbagai program pemerintah telah dijalankan, tantangan dalam pemerataan kesejahteraan tetap menjadi permasalahan yang kompleks.

Provinsi Banten sebagai daerah berkembang di Indonesia memiliki karakteristik sosial, ekonomi dan demografi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024) bahwa Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 12.431.400 Jiwa. Selain itu, Banten juga merupakan hasil dari pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Pemekaran dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Terbentuknya Provinsi Banten sebagai daerah otonomi baru diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan yang dapat memperbaiki dan menunjang proses pembangunan ke arah yang lebih baik.

Banten memiliki potensi ekonomi yang besar dengan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang pesat. Dalam hal ekonomi, Provinsi Banten memiliki beberapa kawasan industri yang penting, seperti Kawasan Industri Krakatau di Cilegon, Kawasan Industri Modern Cikande, dan Kawasan Industri Bitung di Tangerang. Kawasan-kawasan industri ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Banten dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Namun, tingkat

kemiskinan di beberapa daerah di Provinsi Banten masih cukup tinggi.

**Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Banten  
Periode 2021-2024**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin			
	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	10,72	9,32	9,87	9,18
Kab Lebak	10,29	8,91	8,68	8,44
Kab Tangerang	7,12	6,92	6,93	6,55
Kab Serang	5,49	4,96	4,85	4,51
Kota Tangerang	5,93	5,77	5,89	5,43
Kota Cilegon	4,24	3,64	3,98	3,75
Kota Serang	6,79	5,94	6,20	5,65
Kota Tangerang Selatan	2,57	2,50	2,67	2,36

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024) Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 1.1 Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2024 sebesar 5,84%, menurun 0,33% terhadap Maret 2023. Pada tahun 2024 menunjukkan Kabupaten Pandeglang menempati posisi tertinggi dan Kota Tangerang Selatan menunjukkan posisi terendah tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Ketimpangan ekonomi antar wilayah menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini. Wilayah perkotaan seperti Kota

Tangerang dan Kota Cilegon mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat daripada wilayah perdesaan seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Ketimpangan wilayah yang terjadi berakar pada perbedaan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, misalnya, masih bergantung pada sektor pertanian tradisional yang memiliki produktivitas rendah. Minimnya investasi di daerah tersebut menyebabkan terbatasnya peluang kerja yang layak. Di sisi lain, daerah perkotaan di Banten memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas umum, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun adanya kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, tantangan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Banten masih terbilang besar dan serius terutama dalam periode pasca pandemic Covid-19 (Kyla Rahma et al., 2024).

Kemiskinan diukur melalui tiga indeks utama, yaitu garis kemiskinan ( $P_0$ ), kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ), dan keparahan kemiskinan ( $P_2$ ). Angka kemiskinan menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan

kedalaman kemiskinan menunjukkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Keparahan kemiskinan, sebagai indikator ketiga, mengukur tingkat ketimpangan di antara kelompok masyarakat miskin itu sendiri. Ketiga indikator ini digunakan untuk memahami sejauh mana kemiskinan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran (Pangestu et al., 2023).

Indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity P<sub>2</sub>*) bisa menunjukkan bagaimana pengeluaran kelompok termiskin disuatu wilayah tersebut. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin (Ferezegia, 2018). Semakin tinggi angka indeks- Nya, semakin tinggi juga ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (Soleh, 2019). Hal ini dapat disebabkan oleh faktor struktural seperti kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Dalam banyak kasus, masyarakat

yang mengalami keparahan kemiskinan ekstrim sulit keluar dari lingkaran kemiskinan karena terbatasnya sumber daya yang mereka miliki untuk meningkatkan kualitas hidup.

**Tabel 1. 2 Indeks Keparahhan Kemiskinan ( $P_2$ ) di Provinsi Banten Periode 2021-2024**

Kabupaten/Kota	Indeks Keparahhan Kemiskinan ( $P_2$ ) (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Kab Pandeglang	0,33	0,33	0,38	0,35
Kab Lebak	0,40	0,33	0,51	0,23
Kab Tangerang	0,29	0,26	0,39	0,34
Kab Serang	0,12	0,11	0,15	0,20
Kota Tangerang	0,27	0,13	0,19	0,23
Kota Cilegon	0,11	0,09	0,10	0,07
Kota Serang	0,22	0,17	0,16	0,16
Kota Tangerang Selatan	0,26	0,07	0,12	0,05

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2025*

Berdasarkan Tabel 1.2 data keparahan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi dan variasi yang signifikan, terlihat dari masing-masing Kabupaten/Kota memiliki perbedaan indeks keparahan kemiskinan yang belum merata dan sebagian besar perbedaan tersebut masih cukup tinggi. Kabupaten Lebak dan Pandeglang

secara konsisten mencatat indeks keparahan kemiskinan yang relatif tinggi, mengindikasikan konsentrasi kemiskinan yang lebih dalam di wilayah tersebut. Pada tahun 2024, indeks keparahan kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Pandeglang sebesar 0,35 dan yang terendah berada di Kota Tangerang Selatan sebesar 0,05. Perbedaan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh perbedaan struktural yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang hanya berfokus pada sektor tertentu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini saat membuat kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Adanya perbedaan persentase yang begitu besar menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan belum mencapai tingkat yang optimal.

Selain mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi, tujuan utama dari upaya pembangunan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan, kesenjangan ekonomi antar daerah, dan tingkat pengangguran. Faktor *endowment* yang berbeda membuat perbedaan di antara daerah. Jika ada perbedaan ekonomi di antara daerah, efek *backwash* akan lebih besar daripada efek tersebar, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dan meningkatkan keparahan kemiskinan (Kurniasih & Sriyana, 2012).

Keparahan kemiskinan juga berkaitan erat dengan tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang berada dalam kelompok termiskin sering kali memiliki daya tawar yang rendah dalam sektor ekonomi, sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut (Yosi Eka Putri et al., 2015).

Menurut Mudrajat Kuncoro (2006) ketimpangan dapat terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi pada masing-masing daerah. Oleh karena itu terdapat daerah maju dan daerah terbelakang di setiap daerahnya. Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif terhadap



masyarakat, karena ketimpangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor anugrah awal. Rasio Gini merupakan alat yang berguna untuk menilai ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien atau indeks gini ada diantara 0 dan 1. Jika nilai indeks gini adalah 0 maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pengeluaran, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pengeluaran yang sempurna. Ketimpangan sedang memiliki koefisien Gini antara 0,36 dan 0,49, ketimpangan tinggi antara 0,50 dan 0,70, serta ketimpangan rendah antara 0,20 dan 0,35 (Wenda et al., 2025).

**Tabel 1. 3 Gini Ratio di Provinsi Banten  
Periode 2021-2024**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Gini Ratio (Persen)</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Kab Pandeglang	0,266	0,302	0,243	0,245
Kab Lebak	0,332	0,312	0,271	0,257
Kab Tangerang	0,294	0,282	0,286	0,269
Kab Serang	0,264	0,284	0,274	0,267
Kota Tangerang	0,343	0,383	0,379	0,325
Kota Cilegon	0,363	0,318	0,362	0,360
Kota Serang	0,340	0,354	0,359	0,395
Kota Tangerang Selatan	0,370	0,359	0,368	0,353

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025*

Terlihat pada tabel 1.2 ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten bersifat fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024, yang diukur dengan rasio Gini. Kabupaten Lebak mengalami ketimpangan yang relatif menurun dengan rasio Gini yang bervariasi dari 0,332 pada tahun 2021 menjadi 0,257 pada tahun 2024. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan memiliki rasio Gini tertinggi pada tahun 2021 dan 2023, menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Secara keseluruhan, tren ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi masih terdapat variasi antar daerah.

Ketimpangan ini berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan ekstrim di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, termasuk penguatan sektor ekonomi berbasis komunitas, peningkatan akses pendidikan, serta reformasi kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada kelompok miskin.

Selain ketimpangan pendapatan, anggaran dialokasikan untuk berbagai sektor yang memainkan peran penting dalam

mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah belanja modal. Belanja modal adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian, sehingga dengan peningkatan perekonomian kemiskinan akan turun. Pengeluaran pemerintah untuk belanja modal mencakup pembelian aset berjangka panjang seperti tanah, alat berat, dan gedung. Proses ini membutuhkan sumber daya manusia. Proses belanja modal membutuhkan sumber daya manusia. Di sini, menggunakan jasa sumber daya manusia dapat meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kondisi keuangan masyarakat. Namun, ketika sumber daya manusia diperlukan untuk pengoperasian aset belanja modal, jumlah karyawan juga meningkat.

**Tabel 1. 4 Belanja Modal di Provinsi Banten  
Periode 2021-2024**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Belanja Modal (Miliar)</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Kab Pandeglang	333,55	351,91	303,07	268,93
Kab Lebak	281,85	315,87	292,23	267,15
Kab Tangerang	1.245,79	1.553,22	2.002,40	1.910,84
Kab Serang	401,56	394,08	360,81	428,32

Kabupaten/Kota	Belanja Modal (Miliar)			
	2021	2022	2023	2024
Kota Tangerang	555,02	651,93	800,25	519,09
Kota Cilegon	202,12	240,99	225,56	152,15
Kota Serang	245,66	191,00	219,85	111,57
Kota Tangerang Selatan	748,80	965,68	1.250,56	1.164,50

*Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, 2025*

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa belanja modal di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten mengalami fluktuasi selama periode 2021-2024. Kabupaten Tangerang mencatat belanja modal tertinggi secara konsisten, dengan peningkatan signifikan dari 2021 hingga 2023, sebelum sedikit menurun pada 2024. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kota Cilegon dan Kota Serang mengalami penurunan belanja modal yang cukup drastis pada tahun 2024. Kabupaten/kota lainnya menunjukkan variasi dalam tren belanja modal, dengan beberapa mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dinamika investasi modal yang berbeda di setiap daerah di Provinsi Banten, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti prioritas pembangunan, kondisi ekonomi, dan kebijakan anggaran daerah.

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pembangunan di seluruh wilayah. Kebijakan belanja modal yang kurang merata serta ketergantungan terhadap investasi sektor industri di wilayah perkotaan menjadi kendala utama dalam pemerataan pembangunan. Selain itu, infrastruktur transportasi yang belum sepenuhnya terintegrasi antara daerah perkotaan dan pedesaan juga memperburuk disparitas ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan yang lebih berorientasi pada pemerataan pembangunan, seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal serta optimalisasi sektor ekonomi lokal berbasis komunitas.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk mengukur seberapa besar pengaruh ketimpangan pendapatan dan belanja modal terhadap keparahan kemiskinan. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Belanja Modal Terhadap Keparahannya Kemiskinan di Provinsi Banten Periode 2021-2024”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Angka kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan masih tinggi di beberapa wilayah Provinsi Banten, khususnya daerah pedesaan.

2. Terdapat ketimpangan pendapatan antar wilayah yang memengaruhi distribusi kesejahteraan masyarakat.
3. Belanja modal daerah belum merata dan cenderung fluktuatif, sehingga belum optimal dalam mendukung pengentasan kemiskinan.
4. Rendahnya efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi keparahan kemiskinan di Provinsi Banten.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus, terarah dan tidak meluas dari topik pembahasan yang telah dipilih, serta memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai, maka pada penelitian membatasi penelitian pada variabel-variabel independen yang dikaji yaitu ketimpangan pendapatan dan belanja modal terhadap keparahan kemiskinan. Penelitian ini juga dilakukan pada Provinsi Banten dengan tahun penelitian dimulai dari tahun 2021-2024.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada pada penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap keparahan kemiskinan di Provinsi Banten periode 2021-2024?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap keparahan kemiskinan di Provinsi Banten Periode 2021-2024?
3. Apakah ketimpangan pendapatan dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap keparahan kemiskinan di Provinsi Banten Periode 2021-2024?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap keparahan kemiskinan di Provinsi Banten Periode 2021-2024
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap keparahan kemiskinan di Provinsi Banten Periode 2021-2024
3. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan dan belanja modal secara simultan terhadap keparahan kemiskinan di Provinsi Banten Periode 2021-2024

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan akan memberikan manfaat atau kegunaan, antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus menjadi informasi yang dapat dijadikan referensi bagi pembaca mengenai kemiskinan yang dijelaskan dalam indeks keparahan kemiskinan dengan melihat variabel-variabel independen yang telah dipilih yaitu ketimpangan pendapatan, dan belanja modal di Provinsi Banten periode 2021-2024.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep ekonomi pembangunan, yaitu ketimpangan pendapatan, belanja modal, dan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang kajiannya dan menerapkan teori-teori yang penulis dapatkan selama



masa perkuliahan serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang saat ini penulis tempuh.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai rekomendasi untuk mengetahui kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Provinsi Banten agar kebijakan dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena ketimpangan pendapatan dan belanja modal.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari tiap-tiap bab secara terperinci, singkat, dan jelas. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman dalam isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang memuat terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab ini merupakan kerangka teori dan landasan teori serta pengembangan hipotesis yang terdiri dari teori, keterkaitan antar variabel, serta hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian jenis penelitian, jenis data operasional variabel penelitian, dan metode analisis data.

## **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang akan menjelaskan deskripsi temuan dan pembahasan data hasil penelitian sesuai dengan metode yang digunakan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang berkepentingan.